KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Didukung Kiai, Amin yakin kuasai Jatim
Tanggal : Rabu, 01 November 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Netralitas Calon Panglima TNI Disorot

KEPALA Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto diingatkan menjaga netralitas dan tak berpolitik praktis. Terlebih, ia merupakan calon tunggal Panglima TNI pengganti Laksamana Yudo Margono.

"Memohon dengan hormat untuk tetap mengikuti aturan perundang-undangan bahwa prajurit TNI itu harus netral dan tidak berpolitik praktis," kata anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin dalam rapat kerja membahas kesiapan TNI mendukung pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bersama Komisi I DPR, kemarin.

Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto bahkan mengusulkan pembentukan panitia kerja (panja) netralitas TNI. "Kalau memang berkenan untuk menjaga muruah DPR, buatlah panja netralitas TNI," kata politikus PDIP tersebut.

Ia mengaku khawatir apabila pimpinan TNI menerima perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku panglima tertinggi. Prajurit tak bisa menolak perintah atasan. "Yang paling sulit dari kepala staf dan panglima ini kalau presiden perintah. Tentara dari kecil untuk tegak lurus kepada atasan," ujar Utut.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menyambut baik usul itu. Usul tersebut akan didiskusikan terlebih dahulu di Komisi I DPR. "Saya rasa nanti kita akan diskusikan, tetapi memang semua sepakat, Pak. Kalau memang ini untuk NKRI, nanti akan kita buat panja. Kita akan godok di internal nanti, sekaligus secara mekanisme memilih pimpinan panja dan keanggotaan," kata Meutya.

Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memerintahkan para prajurit untuk netral pada Pemilu 2024. Hal itu disampaikan saat rapat kerja membahas kesiapan TNI mendukung pengamanan Pemilu 2024 bersama Komisi I DPR.

Yudo mengatakan sudah berulang kali menekankan supaya para prajurit menjaga netralitas mereka. Seruan itu juga telah disebar di tiap satuan TNI. "Dari awal saya tekankan untuk netral, netral, dan netral," kata Yudo.

Yudo juga membeberkan poin penting soal netralitas TNI. Pertama, para prajurit aktif tak memihak dan tidak memberikan dukungan ke partai politik (parpol) hingga pasangan calon (paslon) tertentu.

Kedua, tidak memberikan sarana dan prasarana TNI kepada para kontestan. Ketiga, keluarga prajurit TNI yang memiliki hak pilih dilarang memberikan arahan dalam menentukan hak pilih.

Keempat, tidak boleh memberikan tanggapan, komentar, dan mengunggah apa pun terhadap hasil *quick count* sementara yang dikeluarkan lembaga survei.

"Kelima, menindak tegas prajurit TNI dan ASN yang terbukti terlibat politik praktis, memihak, dan memberikan dukungan parpol serta paslon yang diusung," ucap Yudo. (Fah/Ant/P-2)